

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Auditor pemerintah merupakan auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya adalah melakukan pertanggung jawaban kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor pemerintah, salah satu auditor yang bekerja di instansi pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan berdasarkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Standar Audit APIP.

Pemeriksaan yang didasarkan pada Kode Etik APIP dapat meningkatkan informasi yang dilaporkan atau diperoleh melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksaan dan pelaporan hasilnya sesuai dengan Kode Etik APIP maka hasil pemeriksaan tersebut akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta pengambilan keputusan penyelenggaraan negara, sehingga kinerja auditor dapat kita lihat dari bagaimana auditor mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Profesional auditor dapat dilihat dari kepatuhan auditor dalam mematuhi aturan etika profesi yang meliputi pengaturan tentang independensi, integritas dan obyektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, serta tanggung jawab dan

praktik lainnya (Satyo, dalam Trisnaningsih, 2007). Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, serta tidak tergantung pada orang lain. Seorang auditor yang independen dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan kepentingan klien, pribadi, maupun pihak lainnya, melainkan berdasarkan fakta dan bukti yang berhasil dikumpulkan selama penugasan (Hery, 2005).

Auditor pada saat mengambil keputusan terkadang dipengaruhi oleh pihak luar yang memiliki kepentingan pribadi, sehingga mengakibatkan auditor mengalami tekanan peran atau konflik peran. Menurut Wolfe dan Snoke dalam Cahyono dan Ghozali (2002) konflik peran timbul karena adanya dua perintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan salah satu perintah saja mengakibatkan terabaikannya perintah lain. Pemahaman aturan organisasi (*good governance*) oleh auditor dalam melaksanakan perintah yang ada tentu akan berjalan sesuai aturan bila menguasai pengetahuan yang baik tentang aturan organisasi ditempat auditor bekerja.

Pemahaman tentang aturan organisasi harus dikuasai dengan baik oleh auditor agar dapat menentukan sikap mereka dalam melakukan tugas audit sesuai aturan yang telah ditetapkan. Aturan yang mengacu prinsip aturan organisasi tidak hanya akan mencegah skandal tetapi juga bisa mendongkrak kinerja korporat (Samianto, dalam Trisnaningsih, 2007). Aturan organisasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja auditor dalam menjalankan profesinya, karena pemahaman auditor tentang konsep yang baik diharapkan memberikan hasil kerja yang baik. Pemahaman aturan

organisasi merupakan sebuah wujud respek terhadap sistem dan struktur yang baik untuk mengolah perusahaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas usaha (Trisnaningsih, 2007), sehingga apabila pemahaman aturan organisasi dipahami secara baik akan menciptakan auditor profesional serta membentuk suatu budaya organisasi yang baik.

Masing-masing organisasi mempunyai budaya organisasi yang berbeda-beda, hal tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas yang menunjukkan jati diri kepribadian karyawan dalam suatu organisasi. Indrianto (2000) menyatakan bahwa penelitian mengenai budaya organisasi merupakan topik yang penting, karena budaya organisasi merupakan salah satu jenis aktiva tidak berwujud milik perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi khususnya kinerja manajer.

Emmons dalam Dyah (2009) mengungkapkan bahwa individu merasa tidak nyaman dalam suatu lingkungan sering mengalami ketidakberdayaan dan kekhawatiran. Sebaliknya kalau ia merasa nyaman dengan lingkungannya ia akan memperlihatkan sifat positif dan memilih tinggal lebih lama dalam lingkungan tersebut. Lebih jauh, kesesuaian antara individu dengan budaya organisasi dimana ia bekerja, akan menimbulkan kepuasan kerja, komitmen kerja dan akan mendorong individu untuk bertahan pada suatu perusahaan dan karir dalam jangka panjang (Kotter dan Heskett, Wallach, dan O'Reilley III dalam Dyah, 2009).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mencermati sejauh mana independensi, konflik peran, pengetahuan *good governance* dan budaya

organisasi mempengaruhi kinerja auditor pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Independensi, Konflik Peran, Pemahaman *Good Governance* dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari Elya Wati dkk (2010), yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan mengganti variabel independen dan obyek penelitian.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Kinerja auditor pada penelitian ini hanya sebatas pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor.
2. Independensi hanya sebatas pengertian yang ada di Standar Profesi Akuntan Publik.
3. Penjelasan mengenai konflik peran hanya sebatas pada penyebab konflik peran dan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik peran.
4. *Good governace* hanya sebatas pada lima prinsip utama yaitu; transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban kemandirian dan kewajaran.
5. Budaya organisasi hanya sebatas pada fungsi budaya organisasi dan sifat-sifat yang dimiliki buadaya organisasional.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi, pemahaman *good governance* dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah.
2. Apakah konflik peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor pemerintah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah independensi, pemahaman *good governance* dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah.
2. Untuk mengetahui apakah konflik peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor pemerintah.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bidang Teoritis
 - a. Memberikan tabahan bukti empiris pada literatur khususnya dibidang auditing dan akuntansi keprilakuan.

b. Menyediakan informasi-informasi yang kemungkinan diperlukan untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Bidang Praktik.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis untuk organisasi terutama kantor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam mengelola sumber daya manusia.